

**KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM  
MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG  
YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh

**YOHAN SETIAWAN**

**NIM : 2019010031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM  
MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG  
YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**YOHAN SETIAWAN**

**NIM : 2019010031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH**

Nama : YOHAN SETIAWAN

N I M : 2019010031

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 9 Juni 2023

Pembimbing I,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II,



**Abdul Basid, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



**BERITA ACARA BIMBINGAN**

1. Nama Mahasiswa : **YOHAN SETIAWAN**
2. N.I.M : 2019010031
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH**
6. Pembimbing I : **Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
Pembimbing II : **Abdul Basid, S.H., M.H.**
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	05-12-2022	Judul		
2	10-01-2023	Rumusan Masalah		
3	15-02-2023	Metode Penelitian		
4	10-03-2023	Metode Penulisan		
5	04-04-2023	Pembahasan Bab I		
6	08-05-2023	Pembahasan Bab II		
7	31-05-2023	Pembahasan Bab III		
8	08-06-2023	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 9 Juni 2023
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 21 Juni 2023

Pembimbing I

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II

**Abdul Basid, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH**

NAMA : YOHAN SETIAWAN

N.I.M : 2019010031

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 21 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019950020  
Ketua.

2. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.  
NIPY : 107102020120030  
Anggota.

3. Nama : Arkisman, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019890015  
Anggota.

Mengetahui,  
Dekan.



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY: 107102020070040

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : YOHAN SETIAWAN  
NIM : 2019010031  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



YOHAN SETIAWAN  
NIM : 2019010031

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : YOHAN SETIAWAN  
NIM : 2019010031  
Program Studi : ILMU HUKUM (S1)  
Fakultas : HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DALAM  
MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA  
PERATURAN DAERAH”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



YOHAN SETIAWAN  
NIM : 2019010031

## **MOTTO**

Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan.

Jika anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.

Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggungjawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar Undang-Undang.

**(Plato)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Basid, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu,

tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 17 Juli 2023

Penulis,

YOHAN SETIAWAN

## ABSTRAK

### KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI TERHADAP GEDUNG YANG BELUM ADA PERATURAN DAERAH

Yohan Setiawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung, ketentuan mengenai peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, serta sanksinya. Di Kabupaten Gresik sendiri masi banyak ditemukan gedung-gedung dalam naungan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang belum memiliki peraturan daerahnya, namun gedung tersebut sudah difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga saat ini dalam menarik retribusi gedung tersebut tanpa adanya dasar dan aturan dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana pengaturan hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam menentukan retribusi terhadap gedung yang belum ada peraturan daerahnya; dan 2). Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gresik terkait gedung yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga yang belum memiliki Peraturan Daerah dalam menentukan retribusi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gresik terkait gedung yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga yang belum memiliki Peraturan Daerah dalam menentukan retribusi. Bahwa dalam hal ini, misalnya apabila pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut bertentangan dengan persyaratan yang diatur oleh Perda 10 Tahun 2019, maka masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan dapat menggugat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diberikan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya penyelesaian sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya administratif. PTUN baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan.

Kata Kunci : Kewenangan; Retribusi; Peraturan; Daerah.

## **ABSTRACT**

### **THE AUTHORITY OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY, CULTURE, YOUTH AND SPORTS OFFICE IN DETERMINING RETRIBUTION FOR BUILDINGS THAT DO NOT YET HAVE REGIONAL REGULATIONS**

*Yohan Setiawan*

*Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*Law Number 28 of 2002 concerning Building regulates building functions, building requirements, building management, including the rights and obligations of building owners and users at every stage of building implementation, including the rights and obligations of building owners and users, provisions regarding the role of the community and guidance by the government, and sanctions. In Gresik Regency itself, there are still many buildings under the auspices of the Youth and Sports Office that do not yet have regional regulations, but the building has been functioned properly, so that currently in attracting the building levy without any basis and regulation from the local government of Gresik Regency. The author raises two issues, namely: 1). How is the legal regulation of the Gresik Regency Tourism and Creative Economy, Culture, Youth and Sports Office in determining retribution for buildings that do not yet have regional regulations; and 2). What is the form of accountability of the Gresik Regency government regarding buildings owned by the Tourism and Creative Economy, Culture, Youth and Sports Office which does not yet have a Regional Regulation in determining retribution.*

*In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.*

*The results of this study show that regarding the form of accountability of the Gresik Regency government related to buildings owned by the Tourism and Creative Economy, Culture, Youth and Sports Office which does not yet have Regional Regulations in determining retribution. That in this case, for example if the granting of a Building Permit (IMB) is contrary to the requirements regulated by the 10-Year Regional Regulation In 2019, people who feel their interests are harmed can challenge the Building Permit (IMB) that has been granted to the State Administrative Court. Efforts to resolve disputes of State Administrative Decisions (KTUN) cannot be directly through judicial efforts without going through administrative efforts. PTUN is only authorized to examine, decide and resolve state administrative disputes if all administrative efforts have been used.*

*Keywords: Authority; Levy; Regulation; Area.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu.....	21
1.7. Metode Penelitian .....	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	23
1.7.2. Metode Pendekatan .....	23
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	25
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	26
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	27
1.8. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT GEDUNG YANG DIMILIKI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
2.1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah .....	30
2.2. Materi dan Landasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia...	36
2.3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Gresik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undangungan .....	43

2.3.1.	Tahap Perencanaan Peraturan Daerah .....	45
2.3.2.	Tahap Penyusunan Peraturan Daerah .....	49
2.3.3.	Tahap Teknik Penyusunan Peraturan Daerah .....	52
2.3.4.	Tahap Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah.....	54
2.3.5.	Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan .....	58
2.4.	Pengaturan Hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Menentukan Retribusi Terhadap Gedung Yang Belum Ada Peraturan Daerahnya ...	60
 <b>BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TERKAIT GEDUNG YANG DIMILIKI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
3.1.	Pengaturan Bangunan dan Gedung Berdasarkan Hukum di Indonesia.	66
3.2.	Pengaturan Bangunan dan Gedung di Kabupaten Gresik .....	72
3.3.	Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Terkait Retribusi Gedung di Kabupaten Gresik .....	80
3.4.	Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gresik Terkait Gedung Yang Belum Memiliki Peraturan Daerahnya .....	83
 <b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1.	Kesimpulan.....	87
4.2.	Saran.....	88
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		